

PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MELALUI DANA DESA DAN BUMDES DIDESA ANGGADITA

Ade Trisyanto
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Buana
Perjuangan, Karawang
adetrisyanto@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

desa merupakan otonomi terkecil dari bagian pemerintahan pusat dan daerah, dengan membangun desa dan memberdayakan masyarakat merupakan wujud dari desa mandiri dan berkembang. Dengan kebijakan pemerintah tentang dana desa dan Pembentukan BUMDesa merupakan salah satu kesempatan pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi desa dengan bantuan sumber dana yang diperuntukan membangun desa, dengan mensosialisasi tentang kebijakan dan pentingnya pengelolaan BUMDesa merupakan cara membangun desa yang lebih maju dan masyarakat mandiri. Dengan optimalnya peran BUMDesa di desa bisa menjadi kontribusi pendapatan desa dengan meningkatkan laba BUMDesa. Dengan meningkatnya bidang perekonomian dalam suatu desa diharapkan bidang pendidikan, bidang kesehatan dapat mengikuti peningkatan seiring kemampuan ekonomi meningkat dalam suatu desa. Kurangnya pemahaman dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa dan BUMDesa menjadi Penghambat dalam berkembangnya perekonomian diharapkan dengan adanya KKN PPM ini menjadi suatu sarana yang tepat yang dihadapai oleh masyarakat anggadita.

Kata kunci—bumdes, dana desa, perekonomian

Abstract

the village is the smallest autonomy of the central and regional government, by building villages and empowering communities is a form of independent and growing villages. With the government's policy on village funds and the establishment of BUMDesa is one of the opportunities of the village government in optimizing the village potensi with the help of a source of funds in order to build the village, by socializing about the policy and the importance of managing BUMDesa is a way of building more advanced villages and independent communities. Optimally the role of BUMDesa in the village can be the contribution of village support by increasing the profit of SOEs. With the increasing field of economy in a village is expected in the field of education, the field of validity can follow the improvement as the economic capability increases in a village. Lack of understanding and openness of informasi in the conversion of village funds and BUMDesa into a inhibitor in the development of the economy is expected with the

presence of KKN PPM is a proper means that is limited by the anggadita community.

Keywords : *bumdes, dana desa, economy*

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan,

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan membangun masyarakat desa dari bagian tatanan negara terkecil diharapkan dapat membangun perekonomian yang stabil berskala nasional.

Dengan kebijakan pemerintah pusat melalui pemberian dana desa untuk pembangunan desa tertinggal dalam prioritas utama, pemberian dana desa diharapkan dapat membantu perekonomian desa menjadi lebih maju. Pada tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran belanja negara 2020 tertuang jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp763.925.645.050.000,00. Dengan rencana yang strategis penggunaan dana desa oleh kepala desa / lurah, ini diharapkan dapat mendorong perekonomian desa menjadi lebih baik dengan realisasi rencana yang tepat.

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa). Pembentukan BUMDesa agar dapat memasarkan hasil industri kecil rumahan agar produk dari desa dapat dipasarkan dengan begitu diharapkan dapat menumbuhkan kewirausahaan di desa serta dapat meningkatkan pendapatan desa. Pembentukan BUMDesa ini telah diatur melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 dimana sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Anggadita memiliki luas wilayah sebesar 4.748 Ha, dan terbagi menjadi 1 Rukun Warga, 7 Dusun, dan 34 Rukun Tetangga. Data yang didapat dari Desa Anggadita tercatat memiliki penduduk sebanyak 10.405 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 5.278 orang dan 5.127 perempuan serta terbagi menjadi 3.381 kepala keluarga. Desa Anggadita memiliki mayoritas penduduk muslim serta profesi yang dominan di masyarakat adalah karyawan swasta, buruh harian lepas, dan pedagang makanan.

Kondisi alam di Desa Anggadita Kecamatan Klari Karawang Timur, tergolong masih hijau karena masih banyak pohon di pekarangan warga. Selain itu kawasan ini banyak didominasi oleh persawahan. Desa Anggadita tergolong daerah urban pehubung antara desa ke kawasan Industri yang jaraknya relatif dekat dengan Kawasan Industri Surya Cipta maupun kawasan industri yang lainnya, sehingga untuk menuju Kantor Desa Anggadita hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit dari keluar gerbang tol karawang timur atau gerbang tol Kawasan Industri Surya Cipta. Akses jalan untuk menuju ke Desa Anggadita mudah diakses oleh kendaraan karena letaknya yang strategis dekat dengan jalan utama klari.

Berdasarkan analisis situasi di desa anggadita berikut isu terkait pengembangan pengembangan perekonomian di desa anggadita:

1. Tingkat pendidikan

Tabel 1. Tingkat pendidikan dan profesi pendidikan

No	Tingkat Pendidikan			Profesi Pendidikan						
	SD	SMP	SMA/SMK	Buruh Tani	Petani	Karyawan	TNI	POLRI	PNS	Pedagang
1	2421	2047	2780	1045	26	1622	3	5	34	20

Sumber data: Quisioner Potensi Pengembangan Desa

Berdasarkan tabel 1 tingkat pendidikan tertinggi di desa anggadita adalah SMA/SMK. Dengan tingkat pendidikan tersebut lapangan pekerjaan yang dapat menerima lulusan SMA/SMK adalah menjadi karyawan pada pabrik di sekitar desa anggadita yang memang jaraknya dekat dengan kawasan pabrik. Dengan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan desa anggadita kurang tercapai. dan profesi buruh tani menjadi dominasi terbanyak dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat desa anggadita. Dimana masyarakat anggadita yang tidak dapat berkerja akan menekuni pekerjaan buruh tani di sawah milik orang. Hampir persawahan yang terdapat di desa anggadita sudah tidak milik masyarakat desa ini di tunjukan bahwa buruh tani di desa anggadita cukup banyak

2. Potensi sumber daya alam

Tabel 2. Potensi Sumber daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam	Keterangan	Hasil
Berapa luas lahan tanah sawah (Ha)?	Ha	1187
Berapa luas lahan tanah kering (Ha)?	Ha	470
Berapa luas lahan tanah basah (Ha)?	Ha	470
Berapa luas lahan tanah perkebunan (Ha)?	Ha	0
Berapa luas lahan tanah fasilitas umum (Ha)?	Ha	12
Berapa luas lahan tanah hutan (Ha)?	Ha	0
Berapa luas total tanah (Ha)?	Ha	4748

Sumber data: Quisioner Potensi Pengembangan Desa

Berdasarkan data tabel 2 dapat di jelaskan bahwa desa anggadita memiliki luas tanah sawah yang cukup besar yaitu 1187 Ha dari total luas wilayah desa anggadita seluas 4748 Ha. Diman hasil panen padi yang di hasilkan di desa anggadita cukup banyak.

3. Potensi Kelembagaan Ekonomi Dan Pendapatan Desa

Tabel 3. BUMDes

Nama BUMDesa	Bidang Bisnis BUMDesa	Jumlah
ANGGADITA JUARA	BUMDesa Keuangan	1
GEMILANG	BUMDesa Usaha	1

Sumber data: Indeks desa membangun

Berdasarkan tabel 3 di desa anggadita terdapat 2 BUMDesa, dimana bidang bisnis BUMDesa tersebut kurang mendukung kondisi perekonomian di desa anggadita lebih bisa berkembang. Seharusnya BUMDesa yang dikelola oleh pihak desa bisa membantu perekonomian desa dengan

memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai program kerja peningkatan perekonomian. BUMDesa bisa saja mendapat kan penyertaan modal melalui dana desa dan pendapatan desa agar BUMDesa yang dikelola bisa lebih profesional dan menghasilkan laba untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan data yang tabel penerimaan dana desa dan pendapatan desa sebagai berikut:

Tabel 4 anggaran pendapatan Desa anggadita

Keterangan	Sumber Pendapatan	
	2019	2020
Pendapatan Asli Desa	Rp 98,000,000	Rp 191,000,000
Dana Desa	Rp 918,366,000	Rp 946,506,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 875,360,000	Rp 545,410,000
Alokasi Dana Desa	Rp 681,610,000	Rp 675,326,000
Bantuan Provinsi	Rp 127,288,000	Rp 130,000,000
Bantuan Kabupaten/Kota	Rp 107,800,000	Rp 5,000,000
Pendapatan Lain-lain	Rp 86,239,077	-

Sumber data: indeks desa membangun

Berdasarkan tabel 4 dana desa yang diterima untuk tahun 2019 dan 2020 terdapat kenaikan penerimaan dana desa, ini bisa menjadi salah satu sumber penyertaan modal dalam mengembangkan BUMDesa melalui rencana strategis yang dapat dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa). Agar pengelola BUMDesa lebih optimal.

B. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah

“upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 11 butir 2 menyatakan bahwa:

“Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”

Menurut Peraturan Menteri Desa 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menyatakan Prinsip prioritas Penggunaan dana desa adalah

1. Prioritas Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 menyatakan daftar kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- a. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

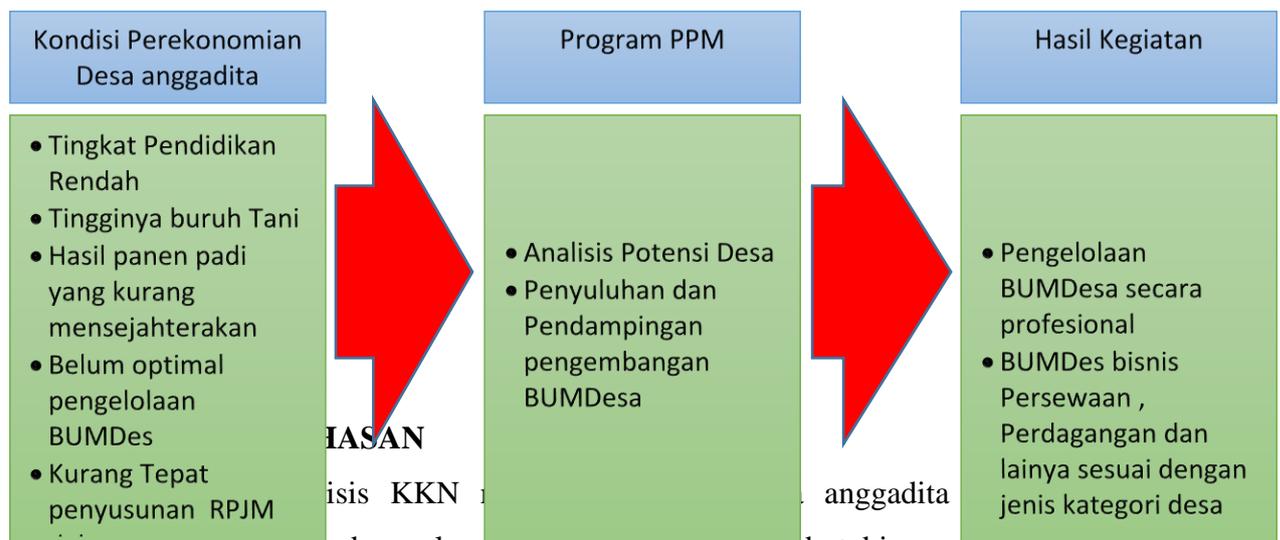
- penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa
- b. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- hutan kemasyarakatan;
 - hutan tanaman rakyat;
 - kemitraan kehutanan;
 - pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Yaitu dengan menyajikan data dibidang ekonomi yang didapat dan memberikan pembahasan dengan mengkaitakan teori dan peraturan terkait data – data yang diperoleh selama observasi. Dalam penelitian ini data digunakan adalah data primer diperoleh langsung dari pemerintah desa berupa Indeks Desa Membangun (IDM) dan Quisioner Potensi dan perkembangan desa KKN universitas buana perjuangan karawang.

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Maka

dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat dan perangkat desa dalam upaya meningkat peran BUMDes dan dana desa sebagai perangkat dalam menjasahterakan perekonomian di desa anggadita. Berikut kerangka Pemecahan Permasalahan dari Pengembangan Perekonomian didesa anggadita:



persawanaan yang cukup besar luasnya, dimana hasil tersebut bisa mencukupi kebutuhan sandang dan papan untuk desa anggadita bila pihak pemerintah desa dapat ikut serta dalam penjualan hasil panen padi yang di dapat dari petani atau buruh tani melalui kelembagaan ekonomi yaitu BUMDesa. Dimana hasil panen padi ini dapat di beli oleh pihak BUMDesa dengan harga yang layak dan dapat meningkatkan laba sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Yang hasilnya untuk mensejahterakan masyarakat dengan program kerja yang membangun desa. Dengan ada nya perbaikan perekonomian ini dapat memicu kesadaran akan pendidikan di masyarakat anggadita dengan meningkatnya pendapatan per kepala keluarga maka tingkat pendidikan akan meningkat dimana tingkat pendidikan tertinggi di desa anggadita adalah lulusan SMA/SMK yang hanya bisa bekerja sebagai buruh tani atau karyawan pabrik di sekitar kawasan industri yang dekat dengan desa anggadita.

Selain itu dengan membangun kemandirian desa melalui pengembangan BUMDesa, yang menjalankan bisnis BUMDesa sesuai dengan kondisi desa anggadita yaitu lebih banyak buruh tani atau petani pemerintah desa dapat membuka bisnis BUMDesa seperti persewaan, yang mempunyai alat-alat pertanian yang dapat di sewakan kepada petani atau buruh tani untuk meminimal kan biaya

operasioanal bercocok tanam di sawah yang bisa lebih cepat dalam pengelolaan tanah atau memanen padi dengan alat-alat yang di sewa oleh para petani atau buruh tani. Dengan biaya yang cukup relavan dan penjualan hasil panen yang cukup layak ini bisa menjadi stimulus dalam membangun perekonomian masyarakat anggadita diman bisa menjadi desa lebih berkembang.

Selain pengembangan bisnis dalam kelembagaan BUMDesa, pengelolaan BUMDes yang profesional dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMDes sehingga dapat mengevaluasi hasil kinerja melalui laporan keuangan bumdes. Peran serta dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membangun desa, dana desa dapat di gunakan untuk pengembangan BUMDesa agar lebih meningkatkan pendapatan desa. Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang di ajukan oleh pemerintah desa sebagai syarat untuk penerimaan dana desa. Ini akan menjadi fokus utama dalam pembangunan desa anggadita. Dimana perekonomian desa anggadita maju dan berkembang maka tidak mungkin bahwa bidang lain dapat mingkat, misalnya peningkatan ekonomi di desa anggadita telah tercapai makan bidang pendidikan di desa anggadita bisa diperbaiki dilihat dengan tingkat pendidikan terakhir dari masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan kebijakan dari pemerintah pusat dengan dana desa dan pembentukan BUMDesa langkah ini seharusnya menjadi sarana dalam peningkatan perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan rencana pembangunan jangka menengah untuk dana desa yang terintegrasi dengan pengelolaan BUMDesa yang tepat dan profesional yang disesuaikan dengan kategori jenis desa yang telah dituangkan dalam peraturan menteri desa. Dapat menjadi acuan dalam memulai rencana pembangunan desa.

Pelaporan yang berkelanjutan dan realibilitas terhadap laporan keuangan BUMDesa ini bisa menjadi sarana evaluasi kinerja untuk mengetahui seberapa efektif atas rencana kebijakan yang di buat dalam pembangunan melalui BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang *Badan Usaha Milik desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*

PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*

PERMEN Desa No 6 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*

www.kemenkeu.go.id,

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8_tKdv7TsAhUg7HMBHTeDCG8QFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fkedesa.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FBuku-Desa-OK.pdf&usg=AOvVaw0RM9vEuXQ82rE_LkB1kYvb diakase tanggal 10 Oktober 2020